

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu indikator penting untuk mengamati hasil pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian. Selain itu, indikator ini sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sampai sejauh mana aktifitas perekonomian selama periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Ada berbagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah diantaranya pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, tingkat pendapatan perkapita (PDRB), dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya ditunjukkan dengan melihat produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

**Tabel 1. 1**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan**  
**Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019**

Tahun	PDRB atas dasar harga konstan	Pertumbuhan
	(juta rupiah)	(%)
2015	49.315.745,00	3,4
2016	51.064.737,30	3,55
2017	54.537.307,20	6,8
2018	57.837.238,90	6,05
2019	61.834.580,00	6,91

Dari tabel diatas dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan disetiap tahunnya dimana yang mengalami peningkatan tertinggi pada pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,8% atau meningkat 3,25% dari tahun sebelumnya, hal ini didasarkan pada sisi produksi peningkatan disebabkan oleh meningkatnya hampir seluruh lapangan usaha daerah mulai dari perkebunan pertanian dan pertambangan. Sementara dari sisi pengeluaran, peningkatan disebabkan antara lain oleh meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana untuk pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kaltara dana yang dikeluarkan berupa dana penerimaan yang di dapatkan melalui pemerintah pusat sebagai wujud pemerataan ekonomi daerah.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak hanya bersumber dari APBN saja, akan tetapi juga bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri. Menurut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) menyebutkan bahwa faktor Pendapatan Asli Daerah

menjadi salah satu tolak ukur yang sering diamati untuk mengukur tingkat pertumbuhan daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah juga bisa dikatakan sebagai suatu faktor yang sangat menentukan tingkat keberhasilan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kebijakan otonomi daerah saat ini. Kapasitas daerah dalam menjalankan otonominya sangat ditentukan dan sangat bergantung dari asal-muasal PAD itu sendiri, sumber dari PAD ialah pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Pemerintah daerah diminta agar selalu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri untuk mengelola potensi yang dimiliki. Inovasi-inovasi baru yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan dana agar bisa membiayai pengeluaran pemerintah daerah yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan daerah (Apriana&Suryanto, 2010).

Saat pemerintahan sedang ditimpa krisis yang mengakibatkan terjadinya ke tidak stabilan ekonomi di Indonesia, masyarakat mendesak pemerintah agar segera menghentikan beberapa kewenangan dalam tata kelola keuangan daerah. Tujuannya supaya bisa mengelola dan membiayai atas dasar kebutuhannya sendiri. Berjalannya kebijakan otonomi ini membuat peluang kepada pemda agar lebih bisa menjalankan segala kewenangan yang dimiliki (Adyatma&Oktaviani, 2015). Otonomi daerah juga memberike kebebasan kepada pemerintah daerah agar lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat, salah satunya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Tahar & Zakhiya (2011) menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena pemda belum optimal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Namun penelitian ini ditolak dari hasil penelitian oleh Gunantara dan Dwiranda(2014) menemukan bukti empiris bahwa PAD ini berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali, ini disebabkan karena meningkatnya pemasukan dana dari PAD melalui sektor pajak dan retribusi daerah yang meliputi sektor pariwisata dan hasil bumi yang sangat dominan di provinsi Bali. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemda akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi daerah yang dimiliki (Nopiani dkk, 2016).

Melihat sisi lain banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, karena setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal ini tentu saja mengakibatkan ketimpangan fiskal antar daerah. (Kusnandar dkk,2012) menyatakan implementasi otonomi daerah ini hanya memberatkan untuk kabupaten dan kota karena adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum. Berdasarkan (UU No.33/2004) Dana Alokasi Umum (DAU) didapatkan dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) yang dialokasikan untuk tujuan membiayai kepentingan daerah dalam wujud pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya dana tersebut Pemerintah Daerah lebih terbantu dan menggunakannya untuk mendanai segala kegiatan operasional pembangunan di daerah. Menurut peneliti Ariani dan Putri (2016) pemda belum mandiri dalam mengelola keuangannya sendiri, hal ini didasarkan atas besarnya DAU yang didapatkan dari pada PAD. Maryati & Endrawati (2010); Dewi & Suputra (2017) menyimpulkan DAU berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasarkan atas konsekuensi pada pelaksanaan desentralisasi di setiap daerah harus mendorong untuk mendanai segala kebutuhan yang ada, tapi pemerintah daerah tidak sepenuhnya bisa menggunakan pembiayaan melalui PAD, kejadian ini terjadi lantaran masing-masing daerah selalu bergantung pada kapasitas daerah yang membuat bergesernya dana untuk menjalankan kegiatan operasional yang berkepanjangan.

Permasalahan ekonomi daerah akan mendapat pengaruh pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri, permasalahan ini dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang mana akan menghambat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadikan salah satu indikator pada tingkat keberhasilan dalam pencapaian pembangunan daerah. Untuk melihat pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, terdapat gambaran apakah kebijakan pembangunan di suatu daerah sudah mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan seperti salah satu kunci sebagai cara untuk menetapkan perekonomian daerah demi pencapaian kesejahteraan rakyat, kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat. dalam QS. Al-A'raf 7:96 membahas tentang kesejahteraan rakyat yang berisi:

وَلَوْ أَنَّا هَلَلْنَا لَأَقْرَأَنَّامُورًا وَاتَّقُوا الْفَنَاءَ عَلَىٰ هِمَّتِمْ كَاتِمِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ضُورًا لَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا هُم مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”Ini adalah janji Allah kepada penduduk negeri mana saja yang jika mereka beriman, Allah pasti akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi, keberkahan inilah yang menjadikan manusia untuk selalu berlomba dalam mencapai kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak.

Melihat dari permasalahan yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian dilakukan lantaran adanya dugaan bahwa kenaikan PAD dan DAU tidak seutuhnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga ada perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Penelitian

ini juga diharapkan mampu untuk mengkaji penelitian yang telah dilakukan oleh Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010) Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penulis menerapkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dependen dan PAD DAU sebagai variabel independen. Serta perbedaan lainnya terdapat pada objek dan subjek penelitian, karena penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar PAD dan DAU berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Utara yang dimana provinsi ini tergolong provinsi baru karena baru ditetapkan pada tahun 2012 lalu, tentu tidak mudah menjadi provinsi yang baru ini untuk bersaing dengan provinsi yang sudah lama merasakan naik turunnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari pencapaian kinerja pemerintah provinsi itu sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari pada latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dibahas, maka hal yang menjadikan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris Dana Alokasi Umum (DAU) dapat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah di Kalimantan Utara.
2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil riset dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemprov Kaltara dalam hal sumber-sumber PAD.
3. Bagi SKPD, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan di level SKPD.
4. Bagi Masyarakat, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pembangunan daerah secara transparansi dan akuntabilitas.